

RASIO KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI DIY PASCA OTONOMI DAERAH

Rudy Badrudin

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta
Jalan Seturan Yogyakarta 55281
Telepon +62 274 486160, 486321, Fax. +62 274 486155
E-mail: rudy@stieykpn.ac.id

ABSTRACT

The research of local regency/city's financial capability in DIY Province post local autonomy is conducted in order to analyze how the regencies government of Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman, and Yogyakarta city optimizing various development program in accordance with the development goals each regency/city. The analytical result of each Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD's regencies/city) of Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman, and Yogyakarta (RKKD) will be useful for each regencies/city's government and for the stakeholders of each regencies/city in order to evaluate various development program engaged. The analysis that can be used to determine whether regencies/city has a PAD excellence between other regencies/city is IKK Method (Financial Capability Indeks) as an average calculation from Growth Index, Elasticity Index, and Share Index. To analyze, the Chi Square and Anova Test with alpha 5% were used.

Keywords: finance ability index, growth index, elasticity index, share index

PENDAHULUAN

Pemberlakuan dua undang-undang tentang Otonomi Daerah per 1 Januari 2001, yaitu Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

yang telah diganti menjadi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang telah diganti menjadi Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah telah memberikan peran yang lebih besar kepada pemerintah, instansi, dan para pelaku ekonomi daerah untuk menangani pembangunan di daerah. Kedua undang-undang tentang otonomi daerah tersebut muncul karena proses pembangunan di Indonesia selama Orde Lama dan Orde Baru telah mengakibatkan terjadinya kesenjangan pembangunan antarwilayah Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Kesenjangan tersebut terjadi karena adanya ketidakmerataan dalam alokasi investasi antarwilayah yang ternyata sangat berpengaruh dalam memicu dan memacu pertumbuhan regional. Oleh karena itu, tepatlah waktunya untuk memberi peran yang lebih besar kepada pemerintah, instansi, dan para pelaku ekonomi daerah untuk menangani pembangunan di daerah.

Pemerataan pembangunan wilayah dengan pemerataan alokasi investasi antarwilayah perlu memperhatikan masalah dan potensi yang ada di wilayah sehingga diharapkan akan terjadi spesialisasi dalam proses pembangunan dengan keunggulan komparatif yang dimiliki masing-masing wilayah. Demikian pula dengan pengembangan wilayah melalui pembangunan di daerah antara pusat pemerintahan daerah provinsi dengan kota/kabupaten dan antara daerah kota/kabupaten dengan kecamatan, dan

seterusnya harus pula memperhatikan masalah dan potensi yang ada. Otonomi daerah yang dilaksanakan per 1 Januari 2001 telah memberikan peran yang lebih besar kepada pemerintah dan para pelaku ekonomi daerah untuk menangani pembangunan di daerah. Tuntutan otonomi daerah muncul untuk merespon kesenjangan pembangunan antarwilayah –Jawa dan luar Jawa serta Indonesia Barat dan Indonesia Timur yang diakibatkan ketidakmerataan dalam alokasi investasi antarwilayah yang berpengaruh dalam pertumbuhan antarwilayah (Badrudin, 2000). Oleh karena itu, pelaksanaan otonomi daerah merupakan *moment* yang tepat untuk memberi peran yang lebih besar kepada pemerintah dan para pelaku ekonomi daerah untuk menangani pembangunan di daerah.

Hakekat pembangunan ekonomi daerah adalah proses yang ditunjukkan dengan tindakan pemerintah dan masyarakat dalam mengelola sumberdaya sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan masyarakat untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut. Masalah pokok dalam pembangunan ekonomi daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (*endogenous development*) dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara lokal. Orientasi ini mengarahkan pada inisiatif yang muncul dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang

peningkatan kegiatan ekonomi.

Setiap usaha pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam usaha untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah beserta masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta masyarakatnya dan dengan menggunakan sumberdaya sumberdaya yang ada di daerah tersebut harus mampu menaksir potensi sumberdaya sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah.

Pendekatan alternatif terhadap teori pembangunan daerah telah dirumuskan untuk kepentingan perencanaan pembangunan ekonomi daerah. Pendekatan ini merupakan sistesis dan perumusan kembali konsep-konsep yang telah ada. Pendekatan ini memberikan dasar bagi kerangka pikir dan rencana tindakan yang akan diambil dalam konteks pembangunan ekonomi daerah. Paradigma baru ditunjukkan pada Tabel 1 berikut ini:

Pemerataan pembangunan wilayah dengan pemerataan alokasi investasi antarwilayah perlu memperhatikan masalah dan potensi yang ada di wilayah sehingga diharapkan akan terjadi spesialisasi dalam proses pembangunan dengan keunggulan komparatif yang dimiliki masing-masing wilayah. Demikian pula dengan pengembangan wilayah melalui pembangunan di daerah antara pusat pemerintahan daerah provinsi dengan kota/kabupaten dan antara daerah kota/kabupaten dengan kecamatan, dan

Tabel 1
Paradigma Baru Teori Pembangunan Ekonomi Daerah

| Komponen | Konsep Lama | Konsep Baru |
|------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Kesempatan Kerja | Semakin banyak perusahaan = semakin banyak peluang kerja | Perusahaan harus mengembangkan pekerjaan yang sesuai dengan kondisi penduduk daerah |
| Basis Pembangunan | Pengembangan sektor ekonomi | Pengembangan lembaga-lembaga ekonomi baru |
| Aset-Aset Lokasi | Keunggulan komparatif didasarkan pada aset fisik | Keunggulan kompetitif didasarkan pada kualitas lingkungan |
| Sumberdaya Pengetahuan | Ketersediaan angkatan kerja | Pengetahuan sebagai pembangkit ekonomi |

Sumber: Arsyad (2004).

seterusnya harus pula memperhatikan masalah dan potensi yang ada.

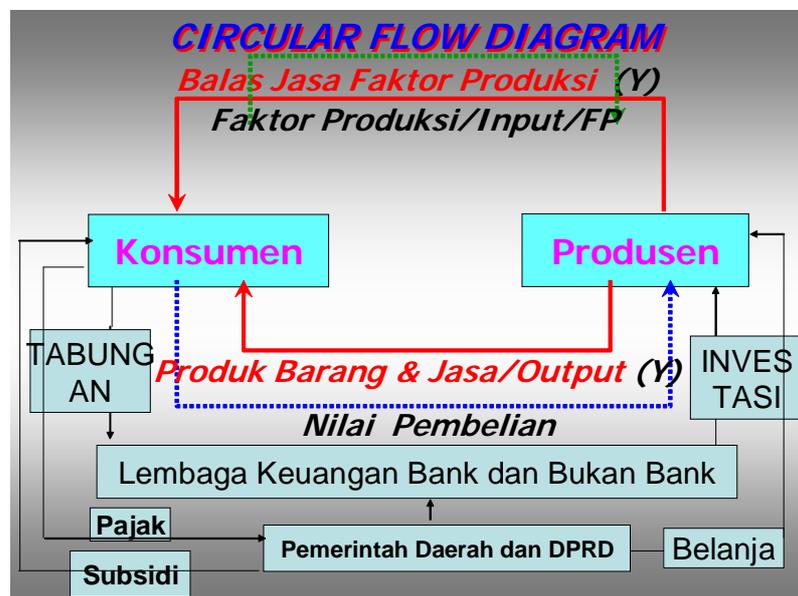
Pemerintah daerah dan pelaku ekonomi di daerah sebagai komponen sumberdaya manusia dalam pelaksanaan otonomi daerah dapat dijelaskan dengan menggunakan *circular flow diagram* seperti yang nampak pada Gambar 1. Diagram tersebut menjelaskan bagaimana pemerintah daerah dan pelaku ekonomi di daerah saling berinteraksi, dengan asumsi ada lima pelaku yaitu masyarakat, perusahaan, lembaga keuangan bank dan bukan bank, pemerintah daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah.

Masyarakat diasumsikan sebagai pelaku ekonomi yang memiliki faktor produksi dan kemudian dijual kepada perusahaan yang oleh karena itu masyarakat akan memperoleh pendapatan. Di samping itu, masyarakat merupakan pelaku ekonomi yang akan mengkonsumsi barang dan jasa pengeluaran konsumsi masyarakat yang dihasilkan perusahaan. Perusahaan diasumsikan sebagai pelaku ekonomi yang melakukan kegiatan produksi, yaitu menghasilkan barang dan jasa yang dijual kepada masyarakat. Perusahaan dapat menghasilkan barang dan jasa karena perusahaan

membeli atau menyewa faktor produksi yang ditawarkan masyarakat.

Lembaga keuangan bank dan bukan bank merupakan lembaga yang mempunyai peran sebagai lembaga perantara (*intermediation role*) dan lembaga pelancar jalannya interaksi ekonomi (*transmission role*). Sebagai lembaga perantara, lembaga keuangan berperan sebagai penghubung antara pelaku ekonomi yang memiliki kelebihan dana (masyarakat) yang ditabung di lembaga keuangan dengan pelaku ekonomi yang membutuhkan dana (perusahaan) yang digunakan untuk investasi. Sebagai lembaga pelancar jalannya interaksi ekonomi, lembaga keuangan bank berperan sebagai lembaga pencetak uang kartal dan uang giral yang digunakan sebagai *medium of exchange, unit of account, store of value, standard deferred of payment, dan medium of commodity*. Pemerintah daerah beserta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai kekuasaan dalam membuat kebijakan-kebijakan untuk meluncurkan interaksi ekonomi antarpelaku ekonomi daerah.

Undang-Undang otonomi daerah sebenarnya sudah ada sejak tahun 1945. Namun dalam



Sumber: Musgrave and Musgrave (1989). Diolah kembali.

Gambar 1
Circular Flow Diagram

pelaksanaannya mengalami fluktuasi operasional sejalan dengan kondisi politik yang ada. Berikut ini diuraikan peraturan perundangan tentang otonomi daerah yang pernah dan sedang berlaku di Indonesia sejak tahun 1945 sampai dengan 2004, yaitu 1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1945, dimana kebijakan pemerintah tentang otonomi daerah lebih menitikberatkan pada dekonsentrasi; 2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1948, dimana kebijakan pemerintah tentang otonomi daerah lebih menitikberatkan pada desentralisasi; 3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1957, kebijakan otonomi bersifat dualisme dimana kepala daerah bertanggungjawab kepada DPRD; 4) Ketetapan Presiden Nomor 6 tahun 1959, Pemerintah lebih menekankan pada dekonsentrasi; 5) Undang-Undang Nomor 18 tahun 1965, dimana kebijakan pemerintah menitikberatkan pada desentralisasi dengan memberikan otonomi yang seluas-luasnya pada daerah sedangkan dekonsentrasi hanya sebagai pelengkap; 6) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974, yaitu dengan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, selanjutnya dengan kebijakan pemerintahan pada masa Orde Baru, pembangunan ekonomi menjadi isu sentral dibandingkan politik yang pada penerapannya seolah-olah terjadi proses politisasi peran pemerintahan daerah dan menggantikannya dengan peran pembangunan yang menjadi isu nasional; 7) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pada masa itu terjadi lagi perubahan yang menjadikan pemerintahan daerah sebagai titik sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mengedepankan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab; dan 8) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pada masa itu terjadi lagi perubahan yang menjadikan pemerintahan daerah sebagai titik sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mengedepankan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab tidak hanya dalam bidang ekonomi tetapi juga politik. Hal ini nampak dengan mulai diberlakukannya Pemilihan Kepala

Daerah Langsung (Pilkadal) mulai bulan Mei 2005.

Menurut UU Nomor 32 tahun 2004, Republik Indonesia menganut asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan tugas pembantuan dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberi kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Hal itu juga disebutkan dalam penjelasan Pasal 18 UUD 1945 yang menyatakan bahwa Pasal 18 UUD 1945 menjadi landasan yang kuat bagi TAP MPR Republik Indonesia Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai landasan yang kuat untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

Otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggungjawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumberdaya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Di samping itu, penyelenggaraan otonomi daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Provinsi merupakan daerah otonom dan sekaligus wilayah administrasi sebagai pelaksana kewenangan pemerintah pusat yang didelegasikan kepada gubernur. Provinsi bukan merupakan pemerintah atasan dari daerah kabupaten atau daerah kota.

Kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan perencanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi kecuali di bidang luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Kewenangan otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan daerah dalam bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup, dan berkembang di daerah. Kewenangan otonomi yang bertanggungjawab adalah perwujudan pertanggung-jawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewajiban kepada daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi.

Untuk menyelenggarakan otonomi daerah tersebut maka daerah diberi kewenangan untuk menggali sumber keuangan daerah sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta antara provinsi dan kabupaten/kota sebagai prasyarat dalam sistem Pemerintahan Daerah.

Menurut UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dalam penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumberdaya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain penerimaan yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari dalam daerah yang bersangkutan yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Dana perimbangan merupakan sumber pembiayaan yang berasal dari bagian daerah dari pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), penerimaan dari sumberdaya alam, dana alokasi umum, dan alokasi khusus.

Dalam era otonomi daerah, persaingan antardaerah kabupaten/kota dalam menggali dana dari luar sangat ketat. Kabupaten Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman, dan Kota Yogyakarta yang terletak di Provinsi DIY perlu mengembangkan lebih

lanjut sumber dana mandiri yang berasal dari PAD, yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Pengembangan PAD Kabupaten Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman, dan Kota Yogyakarta sangat dibutuhkan bagi Kabupaten Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman, dan Kota Yogyakarta itu sendiri dalam rangka membiayai pembangunan di Kabupaten Kabupaten Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman, dan Kota Yogyakarta secara mandiri. Pembiayaan secara mandiri tersebut diperlukan karena sangat berisiko sekali bagi Kabupaten Kabupaten Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman, dan Kota Yogyakarta apabila mengharapkan sumber pembiayaan yang bukan bersumber pada PAD karena dana perimbangan tidak dapat diperoleh daerah secara maksimal karena ada sebagian yang menjadi haknya pemerintah pusat. Pinjaman daerah pun belum dapat diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan daerah karena pelaksanaan pinjaman daerah harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Oleh karena itu, tepatlah kalau pemerintah daerah harus inovatif dalam menggali sumber dana yang berasal dari daerah itu sendiri.

Berdasarkan data APBD dan PAD seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi DIY pasca Otonomi Daerah 1 Januari 2001 diperoleh hasil seperti yang nampak pada Tabel.2 dan Tabel 3 berikut ini:

Data pada Tabel 2 dan Tabel 3 memberikan informasi yang mencakup (1) Karakteristik dan

Tabel 2
Nilai Total Pendapatan pada APBD Kabupaten/Kota se Provinsi DIY
Pasca Otonomi Daerah (Tahun 2001-2005) (juta Rupiah)

| Kabupaten/Kota | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Kabupaten Bantul | 267,332.28 | 336,570.26 | 389,393.97 | 398,879.89 | 442,291.64 |
| Kabupaten Gunung Kidul | 206,666.63 | 251,665.06 | 342,277.68 | 340,447.50 | 351,298.03 |
| Kabupaten Kulon Progo | 221,037.33 | 251,631.71 | 294,377.19 | 296,569.12 | 307,791.01 |
| Kabupaten Sleman | 308,531.58 | 327,995.65 | 452,884.66 | 481,181.46 | 520,548.87 |
| Kota Yogyakarta | 227,009.17 | 303,020.07 | 338,630.76 | 369,649.88 | 391,886.90 |

Sumber: <http://www.depkeu.go.id>. Data diolah.

Tabel 3
Nilai PAD Kabupaten/Kota se Provinsi DIY
Pasca Otonomi Daerah (Tahun 2001-2005) (juta Rupiah)

| Kabupaten/Kota | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Kabupaten Bantul | 14,073.13 | 22,425.15 | 32,882.35 | 30,777.82 | 37,683.85 |
| Kabupaten Gunung Kidul | 8,852.28 | 13,486.85 | 17,481.69 | 19,715.64 | 24,187.46 |
| Kabupaten Kulon Progo | 10,132.95 | 16,225.51 | 24,039.44 | 19,834.96 | 24,332.48 |
| Kabupaten Sleman | 29,571.15 | 34,001.26 | 52,978.74 | 60,112.31 | 77,904.74 |
| Kota Yogyakarta | 40,352.59 | 56,377.46 | 68,621.56 | 79,911.43 | 89,196.41 |

Sumber: <http://www.depkeu.go.id>. Data diolah.

dinamika Kabupaten Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman, dan Kota Yogyakarta pasca Otonomi Daerah 1 Januari 2001 khususnya data perekonomian, infra-struktur, karakteristik sosial, sumberdaya dan institusi, dan sebagainya; dan (2) Hubungan antara Kabupaten Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman, dan Kota Yogyakarta pasca Otonomi Daerah 1 Januari 2001 dengan pemerintah pusat, Provinsi DIY, dan kabupaten yang lain.

Berdasarkan data pada Tabel 2 dan Tabel 3 dapat dihitung nilai kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan pada APBD Kabupaten/Kota se Provinsi DIY. Hasil perhitungan disajikan pada Tabel 4 berikut ini:

Secara umum, kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan pada APBD Kabupaten Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman, dan Kota Yogyakarta pasca Otonomi Daerah Tahun 2001-2005 cenderung meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman, dan Kota Yogyakarta pasca Otonomi Daerah Tahun 2001-2005 semakin mandiri dan mampu dalam membiayai pembangunan di daerahnya. Namun demikian, peningkatan kemandirian dan kemampuan Kabupaten Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman, dan Kota Yogyakarta pasca Otonomi Daerah Tahun 2001-2005 dalam membiayai pembangunan tidak sama. Hal ini nampak berdasarkan hasil perhitungan laju pertumbuhan PAD pada APBD Kabupaten Bantul,

Tabel 4
Kontribusi PAD pada APBD Kabupaten/Kota se Provinsi DIY
Pasca Otonomi Daerah (Tahun 2001-2005) (%)

| Kabupaten/Kota | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Kabupaten Bantul | 5.26 | 6.66 | 8.44 | 7.72 | 8.52 |
| Kabupaten Gunung Kidul | 4.28 | 5.36 | 5.11 | 5.79 | 6.89 |
| Kabupaten Kulon Progo | 4.58 | 6.45 | 8.17 | 6.69 | 7.91 |
| Kabupaten Sleman | 9.58 | 10.37 | 11.70 | 12.49 | 14.97 |
| Kota Yogyakarta | 17.78 | 18.61 | 20.26 | 21.62 | 22.76 |

Sumber: Tabel 2 dan Tabel 3. Data diolah.

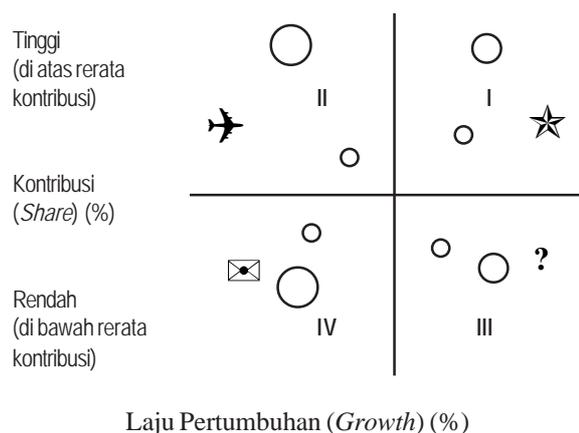
Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman, dan Kota Yogyakarta pasca Otonomi Daerah Tahun 2001-2005 seperti yang disajikan pada Tabel 5 berikut ini:

Analisis untuk mengetahui suatu Kabupaten/Kota memiliki keunggulan PAD di antara Kabupaten/Kota yang lain adalah dengan menggunakan matriks Boston-Consulting Group (BCG Matrix) atau Metode Kuadran (K., Deddy, 2002). BCG Matrix atau Metode Kuadran memiliki empat kuadran yang dipisahkan oleh dua sumbu, yaitu sumbu vertikal dan sumbu horizontal. Sumbu vertikal menunjukkan laju pertumbuhan nilai PAD suatu Kabupaten/Kota terhadap keseluruhan PAD Kabupaten//Kota di Provinsi DIY dan sumbu horizontal menunjukkan kontribusi nilai PAD suatu Kabupaten/Kota terhadap keseluruhan PAD Kabupaten/Kota di Provinsi DIY. Sedangkan laju pertumbuhan PAD diukur dari persentase perubahan nilai PAD suatu Kabupaten/Kota dari tahun ke tahun selama tahun 2001-2005.

Lingkar-lingkar pada BCG Matrix menunjukkan kontribusi dan laju pertumbuhan PAD. Masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi DIY dikelompokkan berdasarkan tinggi rendahnya kontribusi dan pertumbuhan masing-masing PAD. Kabupaten/Kota di Provinsi DIY yang memiliki kontribusi PAD di atas rerata kontribusi seluruh PAD Kabupaten/Kota di Provinsi DIY dikelompokkan ke dalam Kabupaten/Kota di Provinsi DIY yang memiliki kontribusi PAD tinggi, dan sebaliknya. Demikian juga dengan pengelompokkan Kabupaten/Kota di Provinsi DIY berdasarkan laju pertumbuhan PAD. Kabupaten/Kota di Provinsi DIY yang memiliki laju pertumbuhan PAD di atas rerata laju pertumbuhan seluruh PAD

Kabupaten/Kota di Provinsi DIY dikelompokkan ke dalam kelompok Kabupaten/Kota di Provinsi DIY yang memiliki laju pertumbuhan PAD tinggi, dan sebaliknya.

Laju Pertumbuhan (*Growth*) (%)
Rendah (di bawah rerata laju pertumbuhan) Tinggi
(di atas rerata laju pertumbuhan)



Gambar 2
BCG Matrix (Metode Kuadran) Mengukur
Kemampuan Keuangan Kabupaten/Kota
di Provinsi DIY

Penelitian ini dilakukan dalam rangka menganalisis bagaimana Pemerintah Kabupaten Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman, dan Kota Yogyakarta mengoptimalkan berbagai program pembangunan

Tabel 5
Pertumbuhan PAD pada APBD Kabupaten/Kota se Provinsi DIY
Pasca Otonomi Daerah (Tahun 2001-2005) (%)

| Kabupaten/Kota | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|------------------------|-------|-------|--------|-------|-------|
| Kabupaten Bantul | 59.35 | 46.63 | -6.40 | 22.44 | 4.37 |
| Kabupaten Gunung Kidul | 52.35 | 29.62 | 12.78 | 22.68 | 5.37 |
| Kabupaten Kulon Progo | 60.13 | 48.16 | -17.49 | 22.67 | 18.74 |
| Kabupaten Sleman | 14.98 | 55.81 | 13.46 | 29.60 | 11.00 |
| Kota Yogyakarta | 39.71 | 21.72 | 16.45 | 11.62 | 2.72 |

Sumber: Tabel 3. Data diolah.

Tabel 6
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi D.I. Yogyakarta
Menurut Lapangan Usaha, Atas Dasar Harga Berlaku, Tahun 2001 – 2005 (%)

| Lapangan Usaha | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|--------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Pertanian | 18,57 | 17,02 | 16,50 | 15,70 | 15,55 |
| Penggalian | 0,87 | 0,87 | 0,83 | 0,78 | 0,74 |
| Industri Pengolahan | 15,47 | 15,65 | 15,18 | 14,11 | 13,86 |
| Listrik dan Air Bersih | 1,04 | 1,18 | 1,22 | 1,30 | 1,28 |
| Konstruksi | 6,96 | 7,40 | 7,92 | 9,13 | 9,75 |
| Perdagangan, Hotel, dan Restoran | 19,13 | 19,21 | 18,90 | 19,14 | 19,03 |
| Pengangkutan dan Komunikasi | 9,63 | 9,71 | 9,72 | 10,18 | 10,37 |
| Keuangan, Real Estate, dan Jasa Perusahaan | 9,38 | 9,90 | 9,93 | 9,92 | 9,37 |
| Jasa-jasa | 18,96 | 19,06 | 19,80 | 19,74 | 20,06 |

Sumber: BPS Provinsi D.I. Yogyakarta.

sesuai dengan tujuan pembangunan Kabupaten Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman, dan Kota Yogyakarta melalui APBD masing-masing kabupaten/kota. Hasil analisis angka-angka pada item pendapatan pada masing-masing APBD Kabupaten Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman, dan Kota Yogyakarta (analisis RKKD) akan bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman, dan Kota Yogyakarta dan *stakeholders* masing-masing kabupaten/kota dalam melakukan evaluasi terhadap berbagai program pembangunan yang dijalkannya. Analisis rasio keuangan terhadap APBD Kabupaten Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman, dan Kota Yogyakarta dilakukan melalui Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD), yaitu dengan menghitung proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi DIY. Penelitian ini menggunakan data APBD tahun 2001 sampai dengan 2005 karena pada periode tahun tersebut adalah lima tahun awal pelaksanaan Otonomi Daerah pasca pemberlakuan UU Nomor 22 tentang Pemerintahan Daerah Tahun 1999 dan UU Nomor 25 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi UU Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah Tahun 2004 dan UU Nomor 33 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintahan Daerah Tahun 2004.

Selama periode 2001-2005, kinerja perekonomian Provinsi DIY yang ditunjukkan dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) selalu meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2005, nilai PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp29,42 triliun. Secara nominal, PDRB mengalami kenaikan sebesar Rp3,99 triliun dibandingkan tahun 2004 yang sebesar Rp25,43 triliun. Namun demikian, kenaikan ini masih mengandung kenaikan harga barang dan jasa yang diproduksi selama tahun 2005. Rata-rata kenaikan harga barang dan jasa di tingkat produsen pada tahun 2005 mencapai 11,57%. Kenaikan ini dipicu oleh kenaikan harga BBM pada akhir tahun 2005. Berdasarkan harga konstan 2000, nilai PDRB juga mengalami kenaikan dari Rp16,91 triliun pada tahun 2004 menjadi Rp17,54 triliun di tahun 2005. Hal ini menunjukkan, bahwa perekonomian Provinsi DIY mengalami pertumbuhan yang positif sebesar 3,69%. Kenaikan tersebut murni sebagai peningkatan produksi, karena nilai PDRB atas dasar harga konstan telah terbebas dari pengaruh inflasi.

Seiring dengan menyusutnya luas lahan pertanian, kontribusi sektor pertanian juga mengalami penurunan. Apabila pada tahun 2001 sektor pertanian masih mempunyai kontribusi sekitar 18,57%, pada tahun 2005 menurun menjadi 15,55%. Relatif rendahnya

Tabel 7
Perkembangan PDRB Per Kapita Provinsi D.I. Yogyakarta, Tahun 2001 – 2005

| Uraian | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|---------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| PDRB adh. Berlaku (juta rupiah) | 17,521,778 | 19,613,418 | 22,023,880 | 25,427,339 | 29,415,951 |
| PDRB adh. konstan 2000 (juta rupiah) | 14,687,284 | 15,360,409 | 16,146,424 | 16,910,877 | 17,535,354 |
| Penduduk pertengahan tahun (orang)* | 3,208,656 | 3,253,038 | 3,298,033 | 3,343,651 | 3,388,733 |
| PDRB per kapita Adh berlaku (rupiah) | 5,460,784 | 6,029,263 | 6,677,883 | 7,604,663 | 8,680,516 |
| PDRB per kapita Adh. konstan 2000 (rupiah) | 4,577,395 | 4,721,866 | 4,895,774 | 5,057,608 | 5,174,605 |

Sumber: BPS Provinsi D.I. Yogyakarta.

Keterangan: Penduduk pertengahan tahun dihitung berdasarkan proyeksi SP 2000 dan SUPAS 2005.

tingkat inflasi untuk produk pertanian dibanding dengan produk lainnya juga menjadi salah satu penyebab turunnya kontribusi sektor pertanian dalam pembentukan PDRB. Hal ini tercermin dari laju indeks harga implisit beranta.. Secara nominal, sektor industri menghasilkan nilai tambah bruto sebesar Rp4,08 triliun dengan kontribusi sebesar 13,86%, lebih kecil dibandingkan kontribusi tahun 2004 yang mencapai 14,11%. Sejak tahun 2003, porsi sektor industri pengolahan terus mengalami penurunan.

Peranan ketiga kelompok sektor terhadap pembentukan PDRB Provinsi DIY selalu mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2005 peranan sektor primer tercatat sebesar 16,29% atau mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 16,48%. Apabila pada tahun 2004 kontribusi sektor sekunder mencapai 24,54%, maka pada tahun 2005 naik menjadi 24,89%. Peranan sektor tersier yang biasanya selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, namun pada tahun 2005 sedikit menurun. Jika pada tahun 2001 peranan sektor tersier sebesar 57,09% dan di tahun 2004 mencapai 58,99%, maka pada tahun 2005 menjadi sebesar 58,82%. Penjelasan ini mengindikasikan, bahwa struktur ekonomi Provinsi DIY mengalami perubahan peran dari sektor primer ke sektor tersier.

PDRB per kapita dapat digunakan sebagai salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk suatu daerah/wilayah. PDRB per kapita diperoleh dari hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi di suatu wilayah (PDRB) dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah

penduduk berpengaruh terhadap nilai PDRB per kapita. Sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. Angka penduduk yang digunakan adalah jumlah penduduk pada pertengahan tahun hasil Sensus Penduduk (SP) tahun 2000 dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) tahun 2005 beserta proyeksinya.

Nilai PDRB per kapita Provinsi DIY atas dasar harga berlaku sejak tahun 2001 hingga 2005 mengalami peningkatan secara terus menerus. Pada tahun 2001 nilai PDRB per kapita tercatat sebesar Rp5,46 juta,-, dan secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2005 mencapai Rp8,68 juta,-. Kenaikan PDRB perkapita secara riil dapat dilihat dari nilai PDRB berdasarkan harga konstan 2000. Secara riil, ternyata nilai PDRB per kapita sejak tahun 2001 terus mengalami kenaikan dari sebesar Rp4,58 juta,- menjadi Rp5,17 juta,- di tahun 2005.

Struktur ekonomi suatu daerah/wilayah menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah/wilayah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap sektor ekonomi. Struktur ekonomi terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh masing-masing sektor. Dengan melihat kontribusi masing-masing sektor terhadap pembentukan PDRB, maka dapat diketahui seberapa besar peran suatu sektor dalam menunjang perekonomian daerah. Selama lima tahun (2001-2005), struktur perekonomian DIY masih didominasi oleh 4 (empat) sektor, yaitu sektor jasa-jasa; sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor pertanian; serta sektor industri pengolahan. Porsi sektor

jasa-jasa bersama dengan sektor perdagangan, hotel dan restoran setiap tahun cenderung meningkat; sedangkan sektor industri pengolahan cenderung tetap atau bahkan menurun. Demikian pula kontribusi sektor pertanian setiap tahun mengalami penurunan, sebagai akibat menurunnya luas lahan pertanian dan adanya kenaikan harga produk pertanian yang tak secepat produk lain. Fenomena ini menunjukkan, bahwa perekonomian Provinsi DIY mengalami pergeseran dari perekonomian agraris menuju niaga jasa. Industrialisasi yang biasanya terjadi pada beberapa wilayah yang semula berbasis pertanian tidak sepenuhnya terjadi di Provinsi DIY. Walaupun secara nominal sektor industri pengolahan berkembang tetapi kontribusinya cenderung menurun, sementara kontribusi gabungan sektor perdagangan dan jasa-jasa justru selalu meningkat merupakan salah satu indikator bahwa proses industrialisasi di Provinsi DIY mengalami beberapa kendala.

Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah 1) Untuk mengetahui perbedaan proporsi dalam rasio keuangan RKKD Kabupaten Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman, dan Kota Yogyakarta pasca Otonomi Daerah; 2) Untuk mengetahui perbedaan laju pertumbuhan dalam rasio keuangan RKKD Kabupaten Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman, dan Kota Yogyakarta pasca Otonomi Daerah; 3) Untuk mengetahui perbedaan posisi pada *BCG Matrix* (Metode Kuadran) antara Kabupaten Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman, dan Kota Yogyakarta pasca Otonomi Daerah; dan 4) Untuk mengetahui perbedaan Indeks Kemampuan Keuangan Daerah antara Kabupaten Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman, dan Kota Yogyakarta pasca Otonomi Daerah. Manfaat penelitian ini adalah 1) Berdasarkan segi teori, sebagai sumbangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan (teori ekonomi pembangunan, teori ekonomi perencanaan pembangunan, dan teori ekonomi regional) khususnya yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); 2) Berdasarkan segi praktik, sebagai sumbangan bagi pemerintah kabupaten/kota dalam mengetahui pengelolaan APBD, sebagai sumbangan bagi DPRD kabupaten/kota untuk mengetahui wewenang legislasi dalam pengambilan keputusan pemerintah kabupaten/kota, dan sebagai sumbangan bagi pemerintah pusat untuk mengetahui dampak kebijakan pemerintah pusat

terhadap efektifitas perekonomian daerah; dan 3) Sebagai sumbangan referensi bagi peneliti berikutnya secara lebih luas dan rinci.

Batasan penelitian ini ada pada lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian adalah daerah di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang meliputi Kabupaten Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman, dan Kota Yogyakarta. Waktu penelitian dilakukan pada periode tahun 2010 berdasarkan data APBD Kabupaten Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman, dan Kota Yogyakarta. periode tahun 2001-2005. Penggunaan data APBD Kabupaten Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman, dan Kota Yogyakarta. periode tahun 2001-2005, karena periode tahun tersebut merupakan lima tahun pertama era pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2001 berdasarkan Undang-Undang Otonomi Daerah (UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah). Di samping itu, periode tahun 2001-2005 merupakan periode pertama Bupati Sleman dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sleman sebelum dilaksanakannya Sistem Pemilihan Kepala Daerah Langsung (Pilkadal) mulai bulan Mei 2005 berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang menggantikan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

MATERI DAN METODE PENELITIAN

Usaha-usaha pembangunan yang dilakukan berbagai negara, baik negara maju maupun negara sedang berkembang secara teoritis dapat dipelajari dengan teori pertumbuhan ekonomi. Ada dua pengelompokan teori pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, yaitu kelompok mashab historis dan mashab analitis (Arsyad, 2004). Mashab historis adalah suatu pandangan tentang teori pembangunan ekonomi yang melihat pembangunan ekonomi berdasarkan suatu pola pendekatan yang berpangkal pada perspektif sejarah. Metode kajian mashab ini bersifat induktif empiris.

Dalam alam pikiran mashab ini fenomena ekonomi adalah produk perkembangan menyeluruh dan dalam tahap tertentu dalam perjalanan sejarah. Beberapa teori pembangunan ekonomi historis antara lain adalah teori yang dikemukakan oleh Friedrich List, Bruno Hilderbrand, Karl Bucher, dan Walt Whitman Rostow. Mashab analitis adalah suatu pandangan tentang teori pembangunan ekonomi yang mengungkapkan proses pertumbuhan ekonomi secara logis dan konsisten, tetapi sering bersifat abstrak dan kurang menekankan kepada aspek empiris. Metode kajian mashab ini bersifat deduksi teoritis. Beberapa teori pertumbuhan ekonomi analitis antara lain adalah Adam Smith, David Ricardo, Robert Solow dan Trevor Swan (Solow Swan), Sir Roy F. Harrod dan Evsey Domar (Harrod Domar), Nicholas Kaldor, Arthur Lewis, dan Ranis Fei.

Salah satu teori pertumbuhan ekonomi yang berkembang sejak tahun 1950-an adalah teori pertumbuhan ekonomi Neo-Klasik yang dikemukakan oleh Solow Swan Menurut teori pertumbuhan ekonomi Solow Swan, pertumbuhan ekonomi tergantung kepada pertambahan penyediaan faktor-faktor produksi (penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi modal) dan tingkat kemajuan teknologi. Berdasarkan penelitian Solow (1957), dikemukakan bahwa peran dari kemajuan teknologi di dalam pertumbuhan ekonomi sangat tinggi. Pandangan ini didasarkan kepada anggapan yang mendasari analisis Klasik, yaitu perekonomian akan tetap mengalami tingkat pengerjaan penuh dan kapasitas perlatan modal akan tetap sepenuhnya digunakan sepanjang waktu. Dengan demikian, seberapa perkembangan perekonomian akan tergantung pada pertambahan penduduk, akumulasi kapital, dan kemajuan teknologi. Teori pertumbuhan Neo Klasik ini didasarkan kepada fungsi produksi yang dikembangkan oleh Charles Cobb dan Paul Douglas (fungsi produksi Cobb Douglas) yang diformulasikan sebagai berikut:

$$Q = TL^a K^b$$

Keterangan:

- Q = tingkat output pada tahun tertentu
- T = tingkat teknologi pada tahun tertentu
- L = jumlah tenaga kerja pada tahun tertentu
- K = jumlah stok barang modal pada tahun tertentu
- a = persentase perubahan output yang diciptakan

oleh perubahan 1% tenaga kerja

b = persentase perubahan output yang diciptakan oleh perubahan 1% modal

Pendekatan pembangunan ekonomi menekankan pada proses pembentukan modal. Modal inilah yang kemudian digunakan sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Sumber-sumber pembiayaan pembangunan secara makro di Indonesia adalah (1) Ekspor, sebagai penganut sistem ekonomi terbuka, lalu lintas perdagangan internasional sangat berperan penting dalam perekonomian dan pembangunan di Indonesia. Seberapa besar peran tersebut dapat terlihat dari kontribusi ekspor yang sangat besar terhadap devisa Indonesia; (2) Bantuan Luar Negeri dan Penanaman Modal Asing (PMA), di masa awal orde baru, para penentu kebijakan menghadapi kelangkaan modal dan sumber pembiayaan pembangunan. Tabungan domestik waktu itu begitu rendah dan tidak dapat diharapkan meningkat dalam waktu singkat. Jalan keluarnya adalah pembiayaan pembangunan dari sumber-sumber luar negeri, dalam bentuk bantuan luar negeri dan PMA; dan (3) Tabungan Domestik yang diperoleh dari sektor pemerintah dan sektor masyarakat. Tabungan pemerintah yang dimaksud adalah tabungan pemerintah dalam APBN, sebagai selisih antara penerimaan dalam negeri dan pengeluaran rutin. Sedangkan tabungan masarakat merupakan akumulasi dari Tabungan Pembangunan Nasional (Tabanas), Taska, dan Deposito Berjangka. Secara mikro, sumber-sumber pembiayaan pembangunan daerah tidak berbeda. Hanya saja ruang lingkupnya yang lebih kecil, yaitu dalam skala daerah (wilayah regional). Adapun sumber-sumber pendanaan adalah (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Penerimaan Lain-Lain yang Sah dan (2) Partisipasi masyarakat daerah dan kegiatan investasi perusahaan (Kuncoro, 1997).

Acuan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah adalah UU Nomer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Nomer 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Pasal 4 PP Nomer 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah; UU Nomer 17 Tahun 2003

tentang Keuangan Negara; UU Nomer 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; dan UU Nomer 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. Pasal 4 PP Nomer 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola APBD mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan layanan masyarakat.

Pemerintah kabupaten/kota sebagai pihak yang diserahi tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan layanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Penilaian dapat dilakukan dengan cara melakukan proses auditing untuk dinilai oleh profesi akuntansi untuk menegaskan sejauh mana standar akuntansi pemerintahan telah diaplikasikan dengan semestinya dan apakah pos-pos laporan keuangan tersebut telah memenuhi standar kewajaran yang berlaku bagi operasi sebuah pemerintahan daerah. Selain dilakukan proses auditing terhadap laporan keuangan juga dapat dilakukan proses analisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan.

Hasil analisis rasio keuangan APBD suatu daerah dapat digunakan sebagai tolok ukur dalam 1) Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah; 2) Mengukur efektifitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah; 3) Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerah; 4) Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah; dan 5) Melihat pertumbuhan/pekerjaan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

Hasil analisis rasio keuangan APBD suatu daerah dapat disampaikan kepada 1) DPRD sebagai

wakil rakyat; 2) Eksekutif sebagai landasan dalam penyusunan APBD berikutnya; 3) Pemerintah pusat/provinsi sebagai bahan masukan dalam pembinaan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah; 4) Calon kreditor yang bersedia memberikan pinjaman atau pembelian obligasi yang ditawarkan pemerintah daerah; dan 5) Calon investor yang bersedia melakukan investasi di daerah (Halim, 2007). Analisis terhadap APBD menggunakan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) menunjukkan 1) Kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan layanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah; 2) Ketergantungan daerah terhadap sumberdana ekstern; 3) Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah; 4) Tingkat kesejahteraan masyarakat; dan 5) Rasio antara PAD dan Pendapatan Daerah.

Penelitian tentang kemampuan keuangan daerah di Indonesia pasca Otonomi Daerah per 1 Januari 2001 telah banyak dilakukan. Berikut ini disajikan berbagai penelitian yang menjadi referensi dalam melakukan penelitian ini. Penelitian yang dilakukan oleh K. Deddy (2002) menunjukkan bahwa 1) Berdasarkan indikator kinerja PAD, secara umum provinsi-provinsi di Kawasan Barat Indonesia (KBI) mempunyai kemampuan keuangan lebih baik jika dibanding provinsi-provinsi di Kawasan Timur Indonesia (KTI); 2) Provinsi yang mempunyai sumberdaya alam melimpah tidak serta merta memiliki kinerja PAD yang baik; dan 3) Telah dilakukan upaya oleh pemerintah kabupaten/kota untuk meningkatkan kemampuan keuangan kabupaten/kota dan mendorong potensi ekonomi lokal, melalui peningkatan PAD dan investasi berdasarkan potensi yang dimilikinya. Hasil penelitian K. Deddy berdasarkan klasifikasi status kemampuan keuangan daerah seperti yang ditunjukkan pada Tabel 8 berikut ini:

Tabel 8
Klasifikasi Status Kemampuan Keuangan Daerah
Berdasarkan Metode Kuadran

| Kuadran | Kondisi |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I | Kondisi paling ideal. PAD mengambil peran besar dalam APBD dan daerah mempunyai kemampuan mengembangkan potensi lokal. Kondisi ini ditunjukkan dengan besarnya nilai <i>share</i> disertai nilai <i>growth</i> yang tinggi. |
| II | Kondisi ini belum ideal. Kontribusi PAD yang besar dalam APBD mempunyai peluang mengecil karena pertumbuhan PADnya kecil. Kontribusi PAD terhadap APBD tinggi, namun pertumbuhan PAD rendah. |
| III | Kondisi ini belum ideal, tapi daerah mempunyai kemampuan mengembangkan potensi lokal sehingga PAD berpeluang memiliki kontribusi besar dalam APBD. Kontribusi PAD terhadap APBD masih rendah namun pertumbuhan PAD tinggi. |
| IV | Kondisi ini paling buruk. PAD belum mengambil peran yang besar dalam APBD dan daerah belum mempunyai kemampuan mengembangkan potensi lokal. Kontribusi PAD terhadap APBD rendah dan pertumbuhan PAD rendah. |

Sumber: K., Deddy (2002).

Penelitian yang dilakukan oleh Purnamawati (Purnamawati dan Rudy Badrudin, 2004: 192) menunjukkan bahwa 1) intensitas penggunaan input dalam kegiatan ekonomi di Kabupaten Sleman lebih banyak menggunakan input modal K daripada input tenaga kerja L atau bersifat padat modal (*capital intensive*) dengan elastisitas input modal K sebesar 1,0427 dan 2) uji statistik H_0 yang menyatakan bahwa nilai koefisien regresi variabel L adalah nol diterima sedang H_0 yang menyatakan bahwa nilai koefisien regresi variabel K adalah nol ditolak sehingga disimpulkan bahwa nilai PDRB Kabupaten Sleman tahun 2001 secara signifikan hanya dipengaruhi oleh variabel modal. Hal ini berarti faktor modal sebagai penggerak investasi mempengaruhi nilai PDRB sebagai *proxi* variabel kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sleman.

Penelitian yang dilakukan oleh Khasanah (2007) menunjukkan bahwa analisis rasio keuangan pada APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan di Kabupaten Sleman dan Bantul tahun 2004 dan 2005

diperoleh simpulan bahwa hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa ada perbedaan proporsi (rasio keuangan RKKD) Kabupaten Sleman dan Bantul tahun 2004 dan 2005 tidak terbukti. Dengan demikian, secara signifikan tidak ada perbedaan proporsi (rasio keuangan RKKD) Kabupaten Sleman dan Bantul tahun 2004 dan 2005, artinya Pemerintah Kabupaten Sleman dan Bantul semakin mampu dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan layanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Di samping itu, ketergantungan Kabupaten Sleman dan Bantul terhadap sumber dana ekstern semakin menurun.

Penelitian yang dilakukan oleh Handayani (Handayani dan Rudy Badrudin, 2007) menunjukkan bahwa kontribusi terbesar penerimaan APBD Kabupaten Bantul baik pada tahun 2004 maupun tahun 2005 adalah dari pos dana perimbangan, sedangkan kontribusi terbesar ke dua adalah PAD dan kontribusi terkecil berasal dari pos pendapatan lain-lain yang

sah. Kontribusi penerimaan APBD terbesar di Kabupaten Sleman pada tahun 2004 dan 2005 berasal dari dana perimbangan lalu disusul oleh pos PAD dan kontribusi terendah berasal dari pos pendapatan lain-lain yang sah. Kontribusi penerimaan APBD tahun 2004 dan 2005 Kota Yogyakarta terbesar bersumber dari dana perimbangan kemudian disusul dari pos PAD dan kontribusi terkecil bersumber dari pendapatan lain-lain yang sah. Kontribusi penerimaan APBD tahun 2004 dan 2005 Kabupaten Gunung Kidul terendah berasal dari pos pendapatan lain-lain yang sah, kontribusi terbesar kedua bersumber dari pos PAD, sedang kontribusi terbesar berasal dari pos dana perimbangan yang turun sebesar 0,2% dari tahun 2004. Kontribusi penerimaan APBD terbesar di Kabupaten Sleman berasal dari dana perimbangan, peringkat kedua adalah pos pendapatan lain-lain yang sah. Sedangkan kontribusi terendah berasal dari pos PAD.

Berdasarkan analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) terhadap APBD Kabupaten/Kota se Provinsi DIY tahun 2004 dan 2005, disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta semakin mampu dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan layanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Sedangkan kemampuan Kabupaten Sleman untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan layanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan mengalami penurunan. Ketergantungan Kabupaten Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta terhadap sumber dana ekstern semakin menurun. Sedangkan Kabupaten Sleman semakin tergantung pada dana ekstern. Tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta dalam pembangunan daerah semakin tinggi. Sedangkan tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten Sleman dalam pembangunan daerah semakin rendah. Tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta semakin meningkat. Sedangkan tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sleman semakin menurun.

Penelitian yang dilakukan oleh Handayani (Handayani dan Rudy Badrudin, 2007) menunjukkan

bahwa kontribusi sumber-sumber Penerimaan PAD tiap Kabupaten/Kota di Provinsi DIY pada tahun 2004 dan 2005 berbeda-beda. Perbedaan tersebut disebabkan adanya perbedaan kemampuan masing-masing kabupaten/kota dalam menggali sumber-sumber penerimaan PAD. Keadaan tersebut dapat disajikan sebagai berikut 1) Kota Yogyakarta, sumber utama PAD Kota Yogyakarta tahun 2004 dan 2005 berasal dari pos pajak daerah. Sumber terbesar kedua adalah retribusi daerah dan sumber terbesar ketiga berasal dari pos lain-lain PAD yang sah, sedangkan sumber terkecil berasal dari pos hasil pengelolaan kekayaan daerah lain yang dipisahkan; 2) Kabupaten Sleman, sumber utama PAD Kabupaten Sleman tahun 2004 dan 2005 berasal dari pos pajak daerah. Sumber terbesar kedua adalah retribusi daerah dan sumber terbesar ketiga berasal dari pos hasil pengelolaan kekayaan daerah lain yang dipisahkan. Sedangkan sumber terkecil berasal dari pos lain-lain PAD yang sah; 3) Kabupaten Bantul, sumber utama PAD Kabupaten Bantul tahun 2004 dan 2005 berasal dari pos retribusi daerah, sumber terbesar kedua adalah pajak daerah, sumber terbesar ketiga berasal dari pos hasil pengelolaan kekayaan daerah lain yang dipisahkan, dan sumber terkecil berasal dari pos lain-lain PAD yang sah; 4) Kabupaten Kulon Progo, sumber utama PAD Kabupaten Kulon Progo tahun 2004 dan 2005 berasal dari pos retribusi daerah dan sumber terbesar kedua adalah lain-lain PAD yang sah. Sumber terbesar ketiga berasal dari pos pajak daerah, sedangkan pada tahun 2005 berasal dari pos hasil pengelolaan kekayaan daerah lain yang dipisahkan. Sumber terkecil berasal dari pos hasil pengelolaan kekayaan daerah lain yang dipisahkan (pada tahun 2004) dan dari pos pajak daerah (pada tahun 2005); dan 5) Kabupaten Gunung Kidul, sumber utama PAD Kabupaten Gunung Kidul tahun 2004 dan 2005 berasal dari pos retribusi daerah. Sumber terbesar kedua adalah berasal dari pos lain-lain PAD yang sah dan sumber terbesar ketiga berasal dari pos pajak daerah. Sedangkan sumber terkecil berasal dari pos hasil pengelolaan kekayaan daerah lain yang dipisahkan; dan (6) Tingkat partisipasi masyarakat di Provinsi DIY dalam pembangunan daerah semakin tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan semakin besarnya persentase dana APBD yang berasal dari PAD.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

- H1:** Diduga ada perbedaan proporsi dalam rasio keuangan RKKD Kabupaten Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman, dan Kota Yogyakarta pasca Otonomi Daerah.
- H2:** Diduga ada perbedaan laju pertumbuhan dalam rasio keuangan RKKD Kabupaten Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman, dan Kota Yogyakarta pasca Otonomi Daerah.
- H3:** Diduga ada perbedaan posisi pada *BCG Matrix* (Metode Kuadran) antara Kabupaten Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman, dan Kota Yogyakarta pasca Otonomi Daerah.
- H4:** Diduga ada perbedaan Indeks Kemampuan Keuangan Daerah antara Kabupaten Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman, dan Kota Yogyakarta pasca Otonomi Daerah.

Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di Provinsi DIY Kabupaten Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman, dan Kota Yogyakarta sehingga disebut dengan populasi sedang penarikan sampel penelitian merupakan bentuk sensus. Pengumpulan data merupakan proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Mengingat seluruh data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, maka prosedur pengumpulan data dilakukan dengan cara data dikumpulkan dari instansi terkait antara lain Badan Pusat Statistik (BPS) dan dinas lainnya yang terkait di Provinsi DIY dan Kabupaten/Kota. Data yang digunakan dalam penelitian tersebut diperoleh dari berbagai laporan/buku/*compact disk* yang dipublikasikan oleh instansi terkait. Artikel pendukung studi dikumpulkan melalui *website* yang berupa referensi dari terbitan berkala, buku, makalah, jurnal ilmiah, dan laporan penelitian. Data sekunder yang tersedia dikumpulkan, diteliti, didiskusikan, dan diolah dengan berbagai pihak yang berkompeten agar data tersebut valid.

Analisis untuk mengetahui suatu Kabupaten/Kota memiliki keunggulan PAD di antara Kabupaten/Kota yang lain juga dapat menggunakan metode Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) sebagai rata-rata hitung dari Indeks Laju Pertumbuhan (*Growth*), Indeks Elastisitas, dan Indeks *Share*. Laju pertumbuhan (*growth*) merupakan angka pertumbuhan PAD tahun *i* dari tahun *i-1*. Elastisitas adalah rasio Belanja Pembangunan terhadap PAD. Rasio ini untuk melihat sensitivitas atau elastisitas PAD terhadap per-

kembangan ekonomi suatu daerah. *Share* merupakan rasio PAD terhadap Total Pendapatan. Rasio ini mengukur kemampuan daerah membiayai kegiatan rutin dan kegiatan pembangunan. Rasio ini dapat digunakan untuk melihat kapasitas kemampuan keuangan daerah.

Untuk menyusun indeks dari Indeks Laju Pertumbuhan (*Growth*), Indeks Elastisitas, dan Indeks *Share*, ditetapkan nilai maksimum dan minimum dari masing-masing komponen. Menyusun indeks untuk setiap komponen IKK dilakukan dengan menggunakan persamaan umum (K., Deddy, 2002):

$$\text{Indeks X} = \frac{\text{Nilai X hasil pengukuran} - \text{Nilai X kondisi minimum}}{\text{Nilai X kondisi maksimum} - \text{Nilai X kondisi minimum}}$$

Berdasarkan persamaan tersebut maka persamaan IKK dapat ditulis sebagai berikut:

$$\text{IKK} = \frac{\text{XG} + \text{XE} + \text{XS}}{3}$$

Keterangan:

XG = Indeks Pertumbuhan (PAD)

XE = Indeks Elastisitas (Belanja Pembangunan terhadap PAD)

XS = Indeks *Share* (PAD terhadap Total Pendapatan)

Nilai IKK lima Kabupaten/Kota di Provinsi DIY diurutkan mulai dari yang terbesar. Sepertiga besar pertama dikelompokkan dan dikategorikan sebagai Kabupaten/Kota di Provinsi DIY yang mempunyai kemampuan keuangan tinggi. Sepertiga besar kedua dikelompokkan dan dikategorikan sebagai Kabupaten/Kota di Provinsi DIY yang mempunyai kemampuan keuangan sedang, dan sepertiga besar terakhir dikelompokkan dan dikategorikan sebagai Kabupaten/Kota di Provinsi DIY yang mempunyai kemampuan keuangan rendah.

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan data pada Tabel 4 dan Tabel 5, maka dapat disarikan nilai kualitatif kontribusi dan pertumbuhan PAD pada APBD Kabupaten Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman, dan Kota Yogyakarta pasca Otonomi Daerah Tahun 2001-2005 seperti yang nampak pada Tabel 9 berikut ini:

Tabel 9
Kontribusi dan Pertumbuhan PAD pada APBD Kabupaten Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman, dan Kota Yogyakarta pasca Otonomi Daerah Per Tahun (2001-2005)

| Kabupaten/Kota | 2001 | | | 2002 | | | 2003 | | | 2004 | | | 2005 | | |
|------------------------|------|---|-----|------|---|-----|------|---|-----|------|---|-----|------|---|-----|
| | K | P | Ku |
| Kabupaten Bantul | R | T | III | R | T | III | R | R | IV | R | T | III | R | R | IV |
| Kabupaten Gunung Kidul | R | T | III | R | R | IV | R | T | III | R | T | III | R | R | IV |
| Kabupaten Kulon Progo | R | T | III | R | T | III | R | R | IV | R | T | III | R | T | III |
| Kabupaten Sleman | T | R | II | T | T | I | T | T | I | T | T | I | T | T | I |
| Kota Yogyakarta | T | R | II | T | R | II | T | T | I | T | R | II | T | R | II |

Sumber: Tabel 4 dan Tabel 5. Data diolah.

Keterangan:

K = kontribusi

P = laju pertumbuhan

Ku = kuadran

T = tinggi

R = rendah

Berdasarkan Tabel 9, nampak di antara Kabupaten/Kota di Provinsi DIY pasca otonomi daerah (2001-2005) yang berada pada Kuadran I atau II adalah Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta sedang

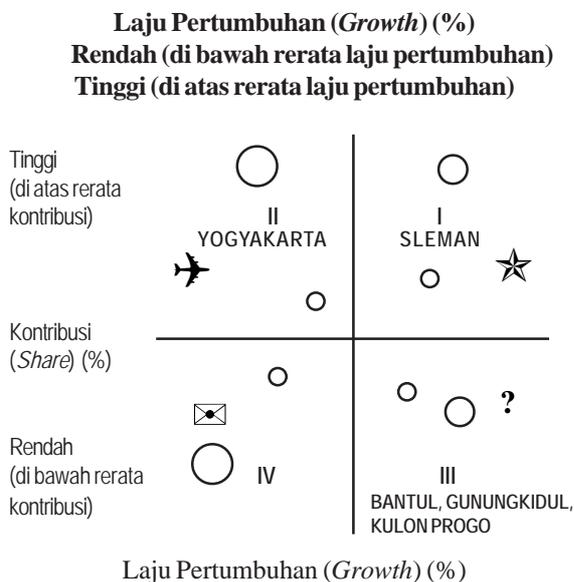
Kabupaten Bantul, Gunung Kidul, dan Kulon Progo selalu berada pada Kuadran III atau IV. Apabila digunakan data rata-rata selama 5 tahun (2001-2005), maka akan diperoleh informasi mengenai masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi DIY seperti yang disajikan pada Tabel 10 berikut ini:

Berdasarkan Tabel 10, dapat diketahui posisi Kabupaten/Kota di Provinsi DIY dengan menggunakan matriks *Boston-Consulting Group (BCG Matrix)* atau Metode Kuadran seperti yang disajikan pada Gambar 3 berikut ini:

Tabel 10
Kontribusi dan Pertumbuhan PAD pada APBD Kabupaten Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman, dan Kota Yogyakarta pasca Otonomi Daerah Selama Lima Tahun (2001-2005)

| Kabupaten/Kota | Kontribusi | Pertumbuhan | Kuadran |
|------------------------|------------|-------------|---------|
| Kabupaten Bantul | R | T | III |
| Kabupaten Gunung Kidul | R | T | III |
| Kabupaten Kulon Progo | R | T | III |
| Kabupaten Sleman | T | T | I |
| Kota Yogyakarta | T | R | II |

Sumber: Tabel 9. Data diolah.



Gambar 3
BCG Matrix (Metode Kuadran) Mengukur Kemampuan Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi DIY

Hasil perhitungan elastisitas Belanja Pembangunan terhadap PAD untuk melihat sensitivitas atau elastisitas PAD terhadap perkembangan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi DIY pasca otonomi daerah (2001-2005) disajikan pada Tabel 11 berikut ini:

Berdasarkan Tabel 11, nampak Kabupaten Kulon Progo memiliki elastisitas Belanja Pembangunan terhadap PAD yang paling besar per tahun 2001-2005, sedang Kota Yogyakarta memiliki elastisitas Belanja Pembangunan terhadap PAD yang paling kecil per tahun 2001-2005.

Perhitungan indeks laju pertumbuhan (*growth*), indeks elastisitas, dan indeks kontribusi (*share*) Kabupaten Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman, dan Kota Yogyakarta pasca Otonomi Daerah Tahun 2001-2005 ditunjukkan pada Tabel 12 berikut ini:

Berdasarkan data pada Tabel 12, dapat dilakukan penghitungan Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) sebagai rata-rata hitung dari Indeks Laju Pertumbuhan (*Growth*), Indeks Elastisitas, dan Indeks *Share*. Hasil penghitungan IKK disajikan pada Tabel 13 berikut ini:

Tabel 11
Elastisitas Belanja Pembangunan Terhadap PAD Kabupaten/Kota di Provinsi DIY Pasca Otonomi Daerah Tahun 2001-2005

| Kabupaten/Kota | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Kabupaten Bantul | 2.229273090 | 2.451973342 | 8.679070687 | 9.245029375 | 8.265487735 |
| Kabupaten Gunung Kidul | 4.611222194 | 3.056626269 | 3.854323009 | 5.943917452 | 4.941021687 |
| Kabupaten Kulon Progo | 5.156953306 | 3.997572958 | 10.05558948 | 13.57932812 | 10.69260593 |
| Kabupaten Sleman | 1.290809454 | 6.334103795 | 4.646594464 | 4.740987495 | 3.780272677 |
| Kota Yogyakarta | 0.407737149 | 0.603047211 | 0.751123845 | 0.722783668 | 3.754116113 |

Sumber: <http://www.depkeu.go.id>. Data diolah.

Tabel 12
Indeks Laju Pertumbuhan (*Growth*), Indeks Elastisitas, dan Indeks Kontribusi (*Share*) Kabupaten/Kota di Provinsi DIY Pasca Otonomi Daerah Tahun 2001-2005

| Kabupaten/Kota | Indeks <i>Growth</i> | Indeks Elastisitas | Indeks <i>Share</i> |
|------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| Kabupaten Bantul | 0.481803013 | 0.562290592 | 0.646900691 |
| Kabupaten Kulon Progo | 0.40846867 | 0.49347148 | 0.461934603 |
| Kabupaten Gunung Kidul | 0.566004639 | 0.490394184 | 0.606985127 |
| Kabupaten Sleman | 0.311802888 | 0.568625174 | 0.415692678 |
| Kota Yogyakarta | 0.425027436 | 0.251024901 | 0.487281482 |

Sumber: Tabel 4, Tabel 5, dan Tabel 11. Data diolah.

Tabel 13
Indeks Kemampuan Keuangan (IKK)
Kabupaten/Kota di Provinsi DIY
Pasca Otonomi Daerah Tahun 2001-2005

| Kabupaten/Kota | IKK |
|------------------------|-------------|
| Kabupaten Bantul | 0.563664765 |
| Kabupaten Gunung Kidul | 0.454624918 |
| Kabupaten Kulon Progo | 0.554461317 |
| Kabupaten Sleman | 0.432040247 |
| Kota Yogyakarta | 0.387777940 |

Sumber: Tabel 11. Data diolah.

Berdasarkan data pada Tabel 13, nampak kabupaten/kota yang memiliki IKK tertinggi adalah Kabupaten Bantul, kemudian Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta.

Hasil pengujian hipotesis untuk mengetahui signifikan tidaknya perbedaan proporsi dalam rasio keuangan RKKD Kabupaten Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman, dan Kota Yogyakarta pasca Otonomi Daerah 1 Januari 2001; signifikan tidaknya perbedaan laju pertumbuhan dalam rasio keuangan RKKD Kabupaten Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman, dan Kota Yogyakarta pasca Otonomi Daerah 1 Januari 2001; signifikan tidaknya perbedaan posisi pada *BCG Matrix* (Metode Kuadran) antara Kabupaten Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman, dan Kota Yogyakarta pasca Otonomi Daerah 1 Januari 2001; dan signifikan tidaknya perbedaan Indeks Kemampuan Keuangan Daerah antara Kabupaten Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman, dan Kota Yogyakarta pasca Otonomi Daerah 1 Januari 2001 menggunakan chi kuadrat untuk menguji perbedaan dari dua proporsi atau lebih dan anova satu arah untuk menguji perbedaan antara *k* rata-rata sampel apabila subyek-subyek

penelitian ditentukan secara random pada setiap grup atau kelompok perlakuan yang ditentukan pada tingkat signifikansi sebesar 5% disajikan sebagai berikut:

Berdasarkan Tabel 14, nampak nilai χ^2 test H1 adalah 0,01 dengan nilai *P value* = 1,00 yang berarti tidak signifikan pada $\alpha = 0,05$. Hal ini berarti hipotesis yang menyatakan bahwa ada perbedaan proporsi dalam rasio keuangan RKKD Kabupaten Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman, dan Kota Yogyakarta pasca Otonomi Daerah 1 Januari 2001 ditolak. Nilai *F test* H2 adalah 9,99 dengan nilai *P value* = 0,000130009 yang berarti signifikan pada $\alpha = 0,05$. Hal ini berarti hipotesis yang menyatakan bahwa ada perbedaan laju pertumbuhan dalam rasio keuangan RKKD Kabupaten Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman, dan Kota Yogyakarta pasca Otonomi Daerah 1 Januari 2001 diterima.

Nilai *F test* H3 adalah 22,08 dengan nilai *P value* = 0,000000422 yang berarti signifikan pada $\alpha = 0,05$. Hal ini berarti hipotesis yang menyatakan bahwa ada perbedaan posisi pada *BCG Matrix* (Metode Kuadran) antara Kabupaten Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman, dan Kota Yogyakarta pasca Otonomi Daerah 1 Januari 2001 diterima. Nilai *F test* H4 adalah 1,51 dengan nilai *P value* = 0,238398346 yang berarti tidak signifikan pada $\alpha = 0,05$. Hal ini berarti hipotesis yang menyatakan bahwa ada perbedaan Indeks Kemampuan Keuangan Daerah antara Kabupaten Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman, dan Kota Yogyakarta pasca Otonomi Daerah 1 Januari 2001 ditolak.

PEMBAHASAN

Berdasarkan Tabel 14, nampak nilai χ^2 test H1 adalah 0,01 dengan nilai *P value* = 1,00 yang berarti tidak signifikan pada $\alpha = 0,05$. Hal ini berarti hipotesis yang menyatakan bahwa ada perbedaan proporsi dalam rasio

Tabel 14
Hasil Pengujian Hipotesis dengan Chi-Square dan Anova

| Hipotesis | Nilai Kritis | Nilai test | P value | Pengujian |
|-----------|--------------|-----------------------|-------------|------------------|
| H1 | 26,2962 | χ^2 test = 0,01 | 1,00 | tidak signifikan |
| H2 | 2,866 | <i>F test</i> = 9,99 | 0,000130009 | signifikan |
| H3 | 2,866 | <i>F test</i> = 22,08 | 0,000000422 | signifikan |
| H4 | 2,866 | <i>F test</i> = 1,51 | 0,238398346 | tidak signifikan |

Sumber: Tabel 4, Tabel 5, dan Tabel 11. Data diolah.

keuangan RKKD Kabupaten Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman, dan Kota Yogyakarta pasca Otonomi Daerah 1 Januari 2001 ditolak. Dengan demikian, selama tahun 2001-2005: 1) Pemerintah Kabupaten Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman, dan Kota Yogyakarta memiliki komitmen yang sama dalam meningkatkan kemampuan membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan layanan kepada masyarakat Kabupaten Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman, dan Kota Yogyakarta yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah; 2) Ketergantungan Kabupaten Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman, dan Kota Yogyakarta terhadap sumber dana ekstern semakin menurun; 3) Tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman, dan Kota Yogyakarta dalam pembangunan daerah semakin tinggi; dan 4) Tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman, dan Kota Yogyakarta semakin meningkat.

Berdasarkan Tabel 14, nampak nilai F test H2 adalah 9,99 dengan nilai P value = 0,000130009 yang berarti signifikan pada $\alpha = 0,05$. Hal ini berarti hipotesis yang menyatakan bahwa ada perbedaan laju pertumbuhan dalam rasio keuangan RKKD Kabupaten Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman, dan Kota Yogyakarta pasca Otonomi Daerah 1 Januari 2001 diterima. Dengan demikian, selama tahun 2001-2005: 1) PAD masing-masing Kabupaten Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman, dan Kota Yogyakarta berbeda yang ditunjukkan dengan besarnya laju pertumbuhan yang berbeda. Perbedaan laju pertumbuhan PAD ini disebabkan perbedaan kemampuan masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi DIY dalam menggali sumber-sumber PAD dengan berbagai strategi; dan 2) Pemerintah Kabupaten Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman, dan Kota Yogyakarta memiliki komitmen yang sama dalam meningkatkan kemampuan membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan layanan kepada masyarakat Kabupaten Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman, dan Kota Yogyakarta seperti yang ditunjukkan dengan kecenderungan peningkatan PAD dari tahun 2001-2005.

Berdasarkan Tabel 14, nampak nilai F test H3 adalah 22,08 dengan nilai P value = 0,000000422 yang berarti signifikan pada $\alpha = 0,05$. Hal ini berarti hipotesis

yang menyatakan bahwa ada perbedaan posisi pada BCG *Matrix* (Metode Kuadran) antara Kabupaten Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman, dan Kota Yogyakarta pasca Otonomi Daerah 1 Januari 2001 diterima. Perbedaan posisi antara Kabupaten Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman, dan Kota Yogyakarta pada BCG *Matrix* (Metode Kuadran) menunjukkan bahwa pemerintah antara Kabupaten Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman, dan Kota Yogyakarta memiliki strategi yang berbeda dalam menggali PAD.

Kabupaten Sleman yang terletak pada Kuadran I merupakan kabupaten dengan kondisi yang paling ideal karena PAD mengambil peran besar dalam APBD dan Kabupaten Sleman punya kemampuan mengembangkan potensi lokalnya. Kondisi ini ditunjukkan dengan besarnya nilai *share* dan nilai *growth* yang tinggi. Strategi pengembangan PAD Kabupaten Sleman yang berada pada Kuadran I adalah memperbesar Belanja Daerah yang sesuai dengan kemampuan riil daerah untuk mengembangkan potensi lokal dan melayani peningkatan aktivitas pelaku ekonomi yang tinggi dan berusaha mempertahankan kontribusi PAD terhadap APBD yang telah dimiliki.

Kota Yogyakarta yang terletak pada Kuadran II merupakan kota dengan kondisi yang belum ideal, tetapi Kota Yogyakarta mempunyai kemampuan mengembangkan potensi lokalnya sehingga PAD berpeluang tetap memiliki kontribusi besar dalam APBD. Kontribusi PAD terhadap APBD yang tinggi namun pertumbuhan PAD rendah. Strategi pengembangan PAD Kota Yogyakarta yang berada pada Kuadran II adalah memperbesar Belanja Daerah yang sesuai dengan kemampuan riil daerah untuk mengembangkan potensi lokal sehingga PAD berpeluang tetap memiliki kontribusi yang besar. Kabupaten Bantul, Gunung Kidul, dan Kulon Progo yang terletak pada Kuadran III merupakan kabupaten dengan kondisi yang juga belum ideal. Kontribusi PAD yang rendah dalam APBD mempunyai peluang meningkat karena pertumbuhan PADnya tinggi. Strategi pengembangan PAD Kabupaten Bantul, Gunung Kidul, dan Kulon Progo adalah dengan menambah Belanja Daerah yang sesuai dengan kemampuan riil daerah untuk mengembangkan potensi lokal.

Berdasarkan Tabel 14, nampak nilai F test H4

adalah 1,51 dengan nilai $P\text{ value} = 0,238398346$ yang berarti tidak signifikan pada $\alpha = 0,05$. Hal ini berarti hipotesis yang menyatakan bahwa ada perbedaan Indeks Kemampuan Keuangan Daerah antara Kabupaten Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman, dan Kota Yogyakarta pasca Otonomi Daerah 1 Januari 2001 ditolak. Jadi sekalipun pada Tabel 13, nampak IKK Kabupaten Bantul yang tertinggi dan Kota Yogyakarta yang terendah, namun secara statistik perbedaan IKK tidak terbukti. Dengan demikian, selama tahun 2001-2005 kemampuan keuangan Kabupaten Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman, dan Kota Yogyakarta relatif sama. Hal ini dapat dijelaskan karena hampir semua Kabupaten Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman, dan Kota Yogyakarta mempunyai proporsi rasio keuangan yang sama yang ditunjukkan dengan kontribusi PAD terhadap APBD yang sama dan signifikan pada $\alpha = 5\%$ secara statistik walaupun laju pertumbuhan PAD antar Kabupaten/Kota berbeda.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Tidak ada perbedaan proporsi dalam rasio keuangan RKKD Kabupaten Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman, dan Kota Yogyakarta pasca Otonomi Daerah 1 Januari 2001; 2) Ada perbedaan laju pertumbuhan dalam rasio keuangan RKKD Kabupaten Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman, dan Kota Yogyakarta pasca Otonomi Daerah 1 Januari 2001; 3) Ada perbedaan posisi pada BCG Matrix (Metode Kuadran) antara Kabupaten Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman, dan Kota Yogyakarta pasca Otonomi Daerah 1 Januari 2001; dan 4) Tidak ada perbedaan Indeks Kemampuan Keuangan Daerah antara Kabupaten Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman, dan Kota Yogyakarta pasca Otonomi Daerah 1 Januari 2001.

Saran

Dalam meningkatkan PAD, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota perlu mempertimbangkan kemungkinan terjadinya *high cost economy* dengan adanya berbagai pungutan pajak

dan retribusi daerah yang dapat berimplikasi pada peningkatan beban perekonomian daerah dan kemunduran daya saing daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincoln. 2004. *Ekonomi Pembangunan*. Edisi 4. Bagian Penerbitan STIE YKPN. Yogyakarta.
- Badrudin, Rudy. 2000. "Pengembangan Wilayah Provinsi DIY (Pendekatan Teoritis)". *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. FE UII. Yogyakarta.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba 4. Jakarta.
- Handayani, Asri Wening dan Rudy Badrudin. 2007. Analisis Deskriptif Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta, Tahun 2004-2005. *Jurnal Ekonomi & Bisnis (JEB)*. Vol. 1 (2), Juli 2007: 91-104.
- _____. 2007. Analisis Deskriptif Struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Di Provinsi D.I. Yogyakarta, Tahun 2004-2005. *Jurnal Ekonomi & Bisnis (JEB)*. Vol. 1 (3), Nopember 2007: 161-176.
- K. Deddy. 2002. *Peta Kemampuan Keuangan Provinsi dalam Era Otonomi Daerah: Tinjauan atas Kinerja PAD dan Upaya yang Dilakukan Daerah*. <http://www.bappenas.go.id>.
- Khasanah, Mufidhatul. 2007. Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD): Kasus APBD Kabupaten Sleman dan Kabupaten Kulonprogo, Tahun 2004 dan 2005. *Jurnal Akuntansi & Manajemen (JAM)*. Vol 18 (1), April 2007: 43-50.
- Kuncoro, Mudrajad. 1997. *Ekonomi Pembangunan Teori, Masalah, dan Kebijakan*. BP UPP AMP YKPN. Yogyakarta.

Purnamawati, Astuti dan Rudy Badrudin. 2004. Analisis Fungsi Produksi Cobb-Douglas Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sleman, Provinsi DIY, Tahun 2001, *Jurnal Akuntansi & Manajemen (JAM)*. Vol. 15 (3), Desember: 203-213.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*.

_____. *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.

_____. 2001. *Undang-Undang Republik Indonesia No-mor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah dan Beberapa Peraturan Pemerintah Bidang Dana Perimbangan Nomor 104, 105, 106, dan 107*. Penerbit PT Mutiara Sumber Widya. Jakarta.

Subiyakto, Haryono. 2001. *Statistika Inferens*. Edisi 2 Bagian Penerbitan STIE YKPN Yogyakarta.